

Neo-Imperialisme Digital di Global South: Penguasaan Akses Internet melalui Proyek Free Basics

Nira Fitryani^{1✉}, Devi Putri Ardyaristi², Revan Fajar Dwi Yuantoro³, Ario Bimo Utomo⁴

(1,2,3,4) Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.

Abstak: Penelitian ini menganalisis proyek Free Basics yang dijalankan Facebook di India sebagai bentuk neo-imperialisme digital di era globalisasi teknologi. Dengan pendekatan ekonomi politik internasional, penulis menelaah bagaimana proyek yang diklaim sebagai inisiatif filantropis ini justru memperlihatkan pola dominasi global big tech terhadap negara Global South. Menggunakan teori neo-imperialisme digital, analisis ini menunjukkan bahwa Free Basics menciptakan ketergantungan struktural baru melalui kontrol atas data, infrastruktur, dan narasi pembangunan digital. Program ini tidak hanya membatasi akses internet, tetapi juga mengarahkan pengguna untuk bergantung pada ekosistem digital Facebook. Melalui studi kasus India, penulis menemukan bahwa meski big tech menggunakan narasi "Connecting the Unconnected", proyek seperti Free Basics hanya berfungsi sebagai instrumen hegemonik yang memperkuat dominasi korporasi global. Keputusan Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) melarang Free Basics menunjukkan adanya resistensi terhadap hegemoni digital dan menegaskan pentingnya kedaulatan data nasional di negara berkembang.

Abstract: This study analyzes Facebook's Free Basics project in India as a form of digital neo-imperialism in the era of technological globalization. Using an international political economy approach, the authors examine how this project, claimed to be a philanthropic initiative, actually reveals Big Tech's pattern of global dominance over the Global South. Using digital neo-imperialism theory, this analysis shows that Free Basics creates new structural dependencies through control over data, infrastructure, and the narrative of digital development. The program not only limits internet access but also directs users to become dependent on Facebook's digital ecosystem. Through a case study of India, the authors find that despite Big Tech's use of the "Connecting the Unconnected" narrative, projects such as Free Basics only serve as hegemonic instruments reinforcing global corporate dominance. The Telecom Regulatory Authority of India's (TRAI) decision to ban Free Basics demonstrates resistance to digital hegemony and affirms the importance of national data sovereignty in developing countries.

Article history:

Received: 17 July 2026

Revised: 19 August 2026

Accepted: 19 August 2026

Published: 24 August 2026

Kata kunci:

Big Tech, Free Basics, Facebook, Global South, neo-imperialisme digital

Keyword:

Big Tech, Free Basics, Facebook, Global South, digital neo-imperialism

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to cite: Fitryani, N., Ardyaristi, D. P., Yuantoro, R. F. D., & Utomo, A. B. (2026). Neo-Imperialisme Digital di Global South: Penguasaan Akses Internet melalui Proyek Free Basics. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(3), 588-598. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i3.758>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam dua dekade terakhir telah mengubah tatanan ekonomi global. Kehadiran perusahaan teknologi raksasa atau big tech seperti Google, Amazon, Meta, Apple, dan Microsoft menunjukkan bahwa sektor digital bukan lagi sekadar sektor industri baru, melainkan infrastruktur yang menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik global. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan layanan komunikasi dan perdagangan, sekaligus mengontrol data, algoritma, dan jaringan yang menjadi fondasi ekonomi digital. Dominasi big tech memunculkan pertanyaan apakah kondisi ini

merupakan bentuk imperialisme modern. Banyak ahli menilai bahwa dominasi big tech dapat memunculkan neo-imperialisme digital, yaitu bentuk kekuasaan global yang memiliki kontrol atas data, platform, dan infrastruktur digital (Jin, 2013).

Dominasi big tech ini sangat nyata di kawasan Global South, termasuk negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Meski big tech membawa peluang baru dalam digitalisasi ekonomi, kehadirannya juga membuat negara menjadi sangat bergantung pada teknologi dan layanan digital milik perusahaan Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan risiko ketergantungan, pengalihan surplus ekonomi ke pusat kapitalisme global, dan keterbatasan kedaulatan digital negara-negara periferi (Christian, 2013). Dominasi perusahaan teknologi ini membentuk imperialisme digital yang memiliki logika serupa dengan imperialisme klasik, namun dalam konteks yang lebih baru. Dengan menggunakan kerangka neo-imperialisme digital, penelitian ini menganalisis bagaimana big tech menciptakan ketergantungan global serta implikasinya terhadap kedaulatan negara dan keadilan global.

Free Basics diklaim sebagai solusi pembangunan digital di negara berkembang dengan tujuan menghubungkan masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses internet. Free Basics mulai diperkenalkan di India dan menimbulkan kontroversi besar karena dianggap melanggar prinsip net neutrality (Kwet, 2019). Facebook bekerja sama dengan operator telekomunikasi lokal untuk menyediakan akses internet gratis bagi sejumlah aplikasi yang bekerja sama dengan Facebook (Bhatia, 2016). Namun, di balik retorika filantropis tersebut, muncul kekhawatiran mengenai motif di balik Free Basics. Model akses internet yang ditawarkan sangat terbatas karena pengguna hanya bisa mengakses situs dan layanan yang telah disetujui Meta, sehingga beberapa ahli menyebutnya sebagai bentuk digital colonialism atau platform imperialism (Couldry & Mejias, 2019).

India menjadi negara yang memicu perdebatan global mengenai Free Basics. Dengan populasi lebih dari satu miliar penduduk yang berbanding jauh dengan angka pengguna internet, Facebook melihat India sebagai pasar potensial untuk memperluas ekosistemnya di Global South (Rai, 2016). Masyarakat sipil India, melalui gerakan savetheinternet, menentang keras proyek ini karena dinilai melanggar net neutrality. Para ahli juga menekankan bahwa program ini dapat merusak kedaulatan data dan kedaulatan digital India, karena data pengguna dan infrastruktur dikendalikan oleh perusahaan asing tanpa campur tangan pemerintah India. Ketergantungan digital yang terjadi berpotensi mempersempit ruang inovasi digital lokal, menghambat kompetisi pasar, dan menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan asing.

Sejauh ini, literatur mengenai dominasi digital big tech di Global South dapat dipetakan ke dalam dua arus besar yang belum banyak dipertemukan. Arus pertama bersifat konseptual-teoretis, dibangun oleh Jin (2013) melalui gagasan platform imperialism, Kwet (2019) melalui kerangka digital colonialism, dan Couldry serta Mejias (2019) melalui konsep data colonialism. Ketiganya menjelaskan secara meyakinkan bagaimana korporasi teknologi Amerika Serikat mereproduksi pola dominasi kolonial melalui kontrol atas infrastruktur, arsitektur, dan data digital, namun kerangka ini umumnya dielaborasi pada level struktural dan minim pembahasan mendalam mengenai episode konkret ketika negara Global South berhasil melakukan resistensi terhadap dominasi tersebut. Arus kedua bersifat empiris-kontekstual, terutama kajian atas kontroversi Free Basics di India oleh Gurusurthy dan Chami (2016) yang menggunakan kerangka ideology in practice, serta Prasad (2018) yang menggunakan konsep recursive public dan teknopolitik untuk menjelaskan kemenangan gerakan savetheinternet. Kajian-kajian ini kaya akan data empiris dan analisis wacana kebijakan, tetapi tidak secara eksplisit menempatkan temuannya dalam kerangka neo-imperialisme digital maupun mengaitkannya dengan

perdebatan yang lebih luas mengenai dependensi struktural dan agensi negara periferi dalam ekonomi politik internasional (Cardoso & Faletto, 1979).

Kesenjangan yang muncul dari pemetaan tersebut adalah belum banyak penelitian yang secara eksplisit menjembatani kerangka teoretis neo-imperialisme digital dengan analisis atas preseden resistensi negara Global South yang berhasil menahan laju ekspansi platform korporasi global. Sebagian besar kajian neo-imperialisme digital cenderung berhenti pada diagnosis pola dominasi, sementara kajian kasus India cenderung berhenti pada analisis dinamika kebijakan domestik tanpa menariknya kembali ke perdebatan konseptual yang lebih luas mengenai kedaulatan digital Global South secara umum. Penelitian ini diposisikan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan dua kerangka yang selama ini berjalan terpisah, yaitu kerangka neo-imperialisme digital dan platform imperialism (Jin, 2013; Kwet, 2019; Couldry & Mejias, 2019) dengan analisis mendalam atas kasus pelarangan Free Basics oleh Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) sebagai preseden resistensi negara Global South. Alih-alih memperlakukan neo-imperialisme digital semata sebagai kondisi struktural yang *given*, penelitian ini menempatkan kasus India sebagai bukti empiris bahwa relasi antara big tech dan negara periferi bersifat dinamis dan dapat dinegosiasikan ulang melalui regulasi, mobilisasi masyarakat sipil, dan penegakan prinsip net neutrality. Pendekatan ini berbeda dari kajian Gurumurthy dan Chami (2016) maupun Prasad (2018) yang berfokus pada dinamika ideologi dan teknopolitik domestik India, karena penelitian ini secara eksplisit mengaitkan temuan tersebut dengan perdebatan struktur-agensi dalam teori dependensi dan neo-imperialisme digital pada skala yang lebih luas, sehingga kasus India dapat dibaca sebagai preseden yang relevan bagi negara Global South lain.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada tiga level. Pertama, kontribusi konseptual, yaitu memperkaya kerangka neo-imperialisme digital dengan dimensi resistensi dan agensi negara periferi yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur yang cenderung menekankan aspek dominasi struktural semata. Kedua, kontribusi empiris, yaitu menyediakan analisis kasus yang terintegrasi mengenai kronologi, aktor, dan mekanisme kebijakan yang menghasilkan pelarangan Free Basics di India, yang dapat menjadi rujukan komparatif bagi kajian serupa di negara Global South lain, termasuk Indonesia. Ketiga, kontribusi praktis, yaitu memberikan basis argumentasi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat sipil di negara berkembang mengenai pentingnya regulasi net neutrality dan kedaulatan data sebagai instrumen mempertahankan otonomi digital nasional di tengah ekspansi platform korporasi teknologi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam dinamika relasi kekuasaan antara korporasi teknologi global dan negara Global South dalam konteks pembangunan digital, sebuah fenomena yang sulit direduksi ke dalam data numerik semata karena melibatkan wacana, kepentingan, dan proses politik yang kompleks.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal (*single case study*) bersifat deskriptif-analitis, mengikuti tradisi Yin, yang menekankan penelusuran mendalam atas satu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak sepenuhnya jelas. Studi kasus dipilih karena fenomena neo-imperialisme digital dan resistensi

terhadapnya tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui generalisasi lintas negara tanpa memperhatikan konteks politik, regulasi, dan sosial yang spesifik pada masing-masing kasus. Desain ini memungkinkan peneliti menelusuri secara rinci kronologi peristiwa, argumentasi para aktor, serta keputusan regulasi yang membentuk hasil akhir dari kontroversi Free Basics.

Alasan Pemilihan Studi Kasus

Kasus penolakan Free Basics oleh TRAI di India dipilih dengan beberapa pertimbangan. Pertama, kasus ini merupakan salah satu preseden paling terdokumentasi secara luas mengenai negara Global South yang berhasil menghentikan ekspansi layanan zero-rating milik korporasi teknologi global melalui jalur regulasi formal, sehingga relevan untuk menguji proposisi mengenai agensi negara periferi dalam kerangka neo-imperialisme digital. Kedua, India memiliki karakteristik yang representatif bagi banyak negara Global South lain: populasi besar dengan tingkat penetrasi internet yang saat itu masih rendah, sehingga menjadi target strategis ekspansi big tech, namun sekaligus memiliki kapasitas kelembagaan regulator telekomunikasi (TRAI) dan masyarakat sipil digital yang cukup kuat untuk mengorganisasi resistensi. Ketiga, ketersediaan dokumentasi publik yang relatif lengkap, meliputi dokumen regulasi resmi TRAI, liputan media internasional, dan kajian akademik yang telah terbit mengenai kasus ini, memungkinkan dilakukannya analisis yang didukung oleh triangulasi sumber.

Sumber dan Karakteristik Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (documentary research) dan dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, sumber akademik berupa artikel jurnal terindeks yang membahas kerangka neo-imperialisme digital, platform imperialism, dan data colonialism, maupun yang secara spesifik mengkaji kontroversi Free Basics di India (Jin, 2013; Kwet, 2019; Couldry & Mejias, 2019; Gurumurthy & Chami, 2016; Prasad, 2018). Kedua, dokumen resmi regulasi berupa peraturan Telecom Regulatory Authority of India mengenai larangan tarif diferensial layanan data (TRAI, 2016), yang menjadi sumber primer bagi keputusan kebijakan yang dianalisis. Ketiga, sumber jurnalistik dari media internasional dan India yang kredibel (di antaranya BBC, The Guardian, Forbes, Indian Express, dan Quartz) yang digunakan untuk merekonstruksi kronologi peristiwa serta pernyataan publik para aktor yang terlibat, termasuk Facebook dan gerakan savetheinternet. Ketiga kategori sumber tersebut saling melengkapi: sumber akademik menyediakan kerangka konseptual, dokumen regulasi menyediakan bukti kebijakan formal, dan sumber jurnalistik menyediakan detail kronologis serta konteks wacana publik yang tidak selalu terekam dalam dokumen resmi maupun artikel akademik.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dengan tiga tahap mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh dokumen yang telah dikumpulkan dibaca secara sistematis untuk mengidentifikasi unit-unit informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian, meliputi kronologi peristiwa, argumentasi aktor pro dan kontra Free Basics, serta pertimbangan regulasi TRAI. Pada tahap penyajian data, unit-unit informasi tersebut dikelompokkan ke dalam kategori tematik yang mengikuti dimensi neo-imperialisme digital, yaitu dominasi infrastruktur dan arsitektur digital, ekstraksi data sebagai sumber ekonomi baru, dan ketergantungan struktural terhadap teknologi asing, sebagaimana dirumuskan Jin (2013) dan Kwet (2019). Pada tahap penarikan simpulan, kategori tematik

tersebut dianalisis secara kritis untuk menjelaskan bagaimana pola dominasi tersebut terwujud dalam kasus Free Basics, sekaligus bagaimana kebijakan TRAI merepresentasikan bentuk resistensi negara periferi terhadapnya. Proses analisis dilakukan secara iteratif, bergerak bolak-balik antara data empiris dan kerangka teoretis, sehingga temuan yang dihasilkan tidak sekadar mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga menafsirkannya dalam kerangka konseptual yang telah ditetapkan.

Strategi Validasi Data

Guna menjaga kredibilitas dan keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber akademik, dokumen regulasi resmi, dan pemberitaan media dari berbagai outlet yang berbeda orientasi (misalnya media bisnis teknologi seperti Quartz dan TechCrunch, media umum seperti The Guardian dan BBC, serta media lokal India seperti Indian Express) untuk memastikan konsistensi fakta mengenai kronologi dan substansi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan triangulasi teori dengan membandingkan interpretasi kasus Free Basics dari berbagai kerangka konseptual yang berbeda, yaitu platform imperialism (Jin, 2013), digital colonialism (Kwet, 2019), data colonialism (Couldry & Mejias, 2019), ideology in practice (Gurumurthy & Chami, 2016), dan recursive public/technopolitics (Prasad, 2018), untuk menghindari bias interpretatif dari satu kerangka teori tunggal. Pemeriksaan silang (cross-checking) dilakukan atas data kuantitatif dengan menelusuri kembali angka ke sumber yang menjelaskan unit analisis, tahap konsultasi, dan periode pengumpulan datanya. Sebagai contoh, Gurumurthy dan Chami (2016) menjelaskan bahwa 23 discrete counter-comments merupakan subset respons yang dipilih untuk dianalisis pada tahap kedua konsultasi publik TRAI, sedangkan lebih dari 2,4 juta respons merupakan keseluruhan respons yang diterima pada proses konsultasi yang lebih luas. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan angka, peneliti tidak langsung memilih angka yang lebih besar, tetapi terlebih dahulu memeriksa apakah angka tersebut mengukur jenis respons, tahap konsultasi, atau periode yang sama (Gurumurthy & Chami, 2016). Prosedur tersebut digunakan untuk memastikan bahwa angka yang dibandingkan memiliki unit pengukuran dan konteks yang sepadan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Neo-Imperialisme Digital dan Platform Imperialisme

Imperialisme memiliki sejarah panjang dalam tradisi Marxis; Lenin melihat imperialisme sebagai tahap tertinggi kapitalisme yang ditandai dominasi kapital finansial, monopoli, dan ekspansi global (Lenin, 1916). Seiring berkembangnya teknologi, logika imperialisme ini tidak hilang, tetapi berubah bentuk mengikuti perkembangan teknologi. Neo-imperialisme digital merupakan perkembangan baru dari praktik imperialisme di era teknologi informasi: dominasi tidak lagi dilakukan melalui penguasaan wilayah fisik atau kekuatan militer, melainkan melalui pengendalian infrastruktur digital, platform internet, dan aliran data secara global (Kwet, 2019).

Dal Yong Jin (2013) menjelaskan melalui konsep platform imperialism bahwa dominasi global dilakukan oleh aktor korporasi seperti Meta, Google, Amazon, dan Apple, yang mengendalikan standar, ekosistem, serta infrastruktur teknologi digital dunia melalui platform yang mereka miliki. Karakteristik neo-imperialisme digital dapat dipahami melalui tiga dimensi: pertama, dominasi infrastruktur dan arsitektur digital, di mana big tech menetapkan regulasi dan mekanisme interaksi digital yang mengatur miliaran pengguna, bahkan melampaui kekuatan regulasi negara. Kedua, ekstraksi data sebagai sumber

daya ekonomi baru dalam kerangka surveillance capitalism; konsep data colonialism yang dibahas Couldry dan Mejias (2019) menjelaskan bahwa praktik ini merupakan kelanjutan kolonialisme lama yang berubah bentuk menjadi eksploitasi data dan perilaku manusia, dengan negara Global South sebagai penyumbang data mentah bagi perusahaan Global North. Ketiga, ketergantungan struktural terhadap teknologi asing, yang membuat negara berkembang kehilangan kedaulatan digitalnya secara tidak langsung ketika bergantung pada platform asing untuk konektivitas dan layanan publik.

Neo-imperialisme digital juga menggunakan narasi filantropis, yaitu iming-iming menghubungkan dunia untuk mengatasi kesenjangan digital. Narasi ini secara tidak langsung menyembunyikan relasi kekuasaan yang timpang, karena perusahaan raksasa memperoleh akses terhadap data dan pasar baru dengan dalih pembangunan sosial. Konsep platform imperialism menjelaskan bagaimana Facebook membentuk arsitektur ekonomi, budaya, dan politik global melalui dominasi platform media sosial, mesin pencari, sistem operasi, dan ekosistem aplikasi. Kondisi ini menegaskan relasi pusat-pinggiran baru dalam bentuk digital: aktor Global North sebagai produsen platform, dan negara Global South sebagai pengguna sekaligus penyedia pasar, tanpa dilibatkan penuh dalam ekosistem nilai ekonominya.

Free Basics di India

Pada tahun 2015, Facebook memperkenalkan Free Basics, sebuah proyek yang menawarkan akses internet gratis untuk aplikasi tertentu, terutama aplikasi milik Meta seperti Facebook, WhatsApp, dan Wikipedia. Meski dipasarkan sebagai inisiatif filantropis, Free Basics memicu kontroversi karena membatasi akses internet hanya pada platform yang dipilih perusahaan. Di India, proyek ini mendapat tantangan luas dari aktivis digital dan masyarakat sipil karena dinilai melanggar prinsip net neutrality, yaitu hak setiap pengguna untuk mengakses internet tanpa diskriminasi (Rai, 2016). Model akses yang terbatas ini menimbulkan bias di masyarakat, khususnya pengguna baru internet yang menganggap internet identik dengan Facebook, hingga akhirnya TRAI melarang Free Basics di India (Desk, 2016).

Gurumurthy dan Chami (2016), melalui kerangka ideology in practice, menunjukkan bahwa kontroversi Free Basics sesungguhnya merupakan pertarungan antara dua ideologi akses yang saling bertentangan: ideologi berorientasi pasar yang memaknai keterbukaan sebagai kebebasan memilih layanan, dan ideologi keadilan sosial yang memaknai keterbukaan sebagai akses penuh dan setara terhadap seluruh internet tanpa diskriminasi. Dari 23 discrete counter-comments yang dianalisis, 16 di antaranya menolak segala bentuk tarif diferensial, termasuk layanan zero-rating, sementara tujuh lainnya mendukungnya. Angka 23 tersebut bukan keseluruhan respons yang diterima TRAI, melainkan subset counter-comments pada tahap kedua konsultasi publik yang dipilih Gurumurthy dan Chami karena keterbatasan waktu dan sumber daya untuk memeriksa seluruh lebih dari 2,4 juta respons yang diterima pada proses konsultasi sebelumnya (Gurumurthy & Chami, 2016). Dengan demikian, angka 23 harus dibaca sebagai unit analisis pada tahap kedua konsultasi, bukan sebagai total partisipasi publik. Temuan tersebut menegaskan bahwa perdebatan ini bukan sekadar soal teknis, melainkan pertarungan wacana mengenai makna keterbukaan, inklusi, dan pemberdayaan dalam kebijakan akses internet.

Kontroversi semakin memuncak ketika Facebook meluncurkan kampanye besar-besaran bertema "support Free Basics" di media nasional dan digital India, yang dinilai manipulatif dan tidak memberikan informasi netral mengenai risiko yang ditimbulkan Free Basics (Ghoshal, 2016). Sebagai respons, Nikhil Pahwa, seorang jurnalis teknologi senior India, memprakarsai gerakan savetheinternet sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap dominasi digital korporasi global, yang kemudian

didukung oleh akademisi, startup lokal, dan publik luas (Matsangou, 2016). Prasad (2018) menjelaskan bahwa gerakan *save the internet* berhasil membentuk apa yang ia sebut sebagai 'recursive public', yaitu komunitas teknopolitik yang tidak hanya memperjuangkan isu net neutrality secara teknis, tetapi juga menautkan perjuangan tersebut pada narasi nasionalisme teknokultural India yang tengah bangkit sebagai kekuatan digital global, sehingga argumentasi mereka mendapatkan resonansi politik yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar kelompok kepentingan teknis semata.

Pada tahap mobilisasi publik yang lebih luas, gerakan *Save the Internet* dilaporkan berhasil menggalang lebih dari satu juta email dukungan terhadap net neutrality untuk dikirimkan kepada TRAI. Angka ini berada pada skala yang berbeda dari 23 discrete counter-comments yang dianalisis Gurumurthy dan Chami (2016), karena merujuk pada keseluruhan mobilisasi publik pada tahap konsultasi sebelumnya, bukan pada subset counter-comments yang menjadi unit analisis mereka. Gurumurthy dan Chami (2016) juga mencatat bahwa TRAI menerima lebih dari 2,4 juta submission dalam kontroversi tersebut. Dengan demikian, angka 23 dan lebih dari satu juta tidak menunjukkan data yang kontradiktif, melainkan mengukur bentuk partisipasi yang berbeda dalam rangkaian konsultasi publik: 23 merupakan jumlah counter-comments yang dianalisis secara khusus, sedangkan lebih dari satu juta merupakan skala mobilisasi publik yang lebih luas. Perbedaan unit dan tahap pengumpulan inilah yang menjelaskan mengapa kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan sebagai dua total respons yang setara (Gurumurthy & Chami, 2016). Tekanan publik tersebut kemudian menjadi bagian dari konteks perdebatan regulasi yang berujung pada keputusan TRAI pada Februari 2016 untuk melarang praktik differential pricing yang diskriminatif terhadap konten atau layanan tertentu (TRAI, 2016; Ghoshal, 2016).

Free Basics sebagai Instrumen Neo-Imperialisme Digital

Menggunakan kerangka neo-imperialisme digital, proyek Free Basics memperlihatkan pola dominasi global big tech: internet gratis yang ditawarkan Facebook merupakan strategi hegemonik karena membatasi akses hanya pada aplikasi tertentu, sehingga menarik pengguna baru agar tetap berada dalam ekosistem digital milik Facebook. Praktik ini relevan dengan logika imperialisme klasik, di mana negara pusat mengintegrasikan wilayah pinggiran ke dalam sistem yang dikendalikannya (Kwet, 2019). Meski tampak menawarkan solusi atas kesenjangan digital di Global South, Free Basics justru memperjelas pergeseran imperialisme menjadi neo-imperialisme digital, yaitu strategi dominasi global melalui kontrol atas data, infrastruktur, dan narasi pembangunan digital (Admin, 2016).

Masalah mendasar dari Free Basics adalah keterbatasan akses internet yang ditawarkannya. Meski memberi manfaat bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses internet, Facebook memposisikan dirinya sebagai gerbang internet yang mengarahkan pengguna hanya pada platform yang dikendalikannya. Perilaku ini khas strategi neo-imperialisme, di mana narasi filantropis digunakan untuk menjalankan ekspansi bisnis sekaligus membangun citra positif dan membuka pasar baru. Kondisi ini memunculkan akses semu: masyarakat periferi memperoleh internet, namun sesungguhnya terjebak dalam ruang digital yang dibatasi dan dikendalikan oleh perusahaan asing.

Studi kasus India menunjukkan bahwa negara masih dapat melawan dominasi ini. TRAI akhirnya melarang Free Basics pada 2016 dengan menegaskan bahwa satu perusahaan tidak boleh menentukan bagaimana internet dapat diakses oleh publik (Kwet, 2019). Kasus ini membuktikan bahwa meski big tech memiliki kekuatan besar, penegakan aturan dan resistensi kolektif tetap dapat dilakukan oleh negara. Kondisi ini berbeda dengan Afrika, di mana regulasi yang lebih lemah membuat Free Basics

tetap berjalan meski mempersempit pemahaman masyarakat tentang dunia digital (Nothias, 2020). Big tech memanfaatkan kelemahan institusional di Global South untuk memperluas kontrolnya, karena selain berperan sebagai penyedia akses, perusahaan juga memperoleh data pengguna yang dapat dimonetisasi melalui iklan dan pengembangan algoritma.

Posisi Temuan dalam Peta Literatur

Temuan penelitian ini menegaskan sekaligus memperluas argumen yang dikembangkan dalam dua arus literatur yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Di satu sisi, temuan ini mengonfirmasi kerangka platform imperialism dan digital colonialism (Jin, 2013; Kwet, 2019; Couldry & Mejias, 2019): Free Basics memang beroperasi sebagai instrumen dominasi struktural yang mengarahkan pengguna baru ke dalam ekosistem tertutup milik Facebook. Di sisi lain, dengan menautkan temuan tersebut pada analisis Gurusurthy dan Chami (2016) mengenai pertarungan ideologi akses, serta Prasad (2018) mengenai teknopolitik recursive public, penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi struktural big tech bukanlah kondisi yang tak terelakkan. Kasus India membuktikan bahwa kombinasi antara kapasitas regulasi negara (TRAI) dan mobilisasi masyarakat sipil digital (savetheinternet) mampu menghasilkan resistensi yang efektif terhadap ekspansi platform korporasi global. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan yang teridentifikasi sebelumnya, yaitu menjembatani kerangka teoretis neo-imperialisme digital dengan bukti empiris mengenai agensi negara Global South, sekaligus menawarkan preseden analitis yang dapat digunakan untuk membaca dinamika serupa di negara berkembang lain, termasuk Indonesia, yang tengah menghadapi ekspansi berbagai layanan zero-rating dan bundling data dari platform digital global.

Implikasi bagi Kedaulatan Digital Negara Global South

Kasus big tech menunjukkan bahwa imperialisme dalam era digital masih mengikuti logika lama, yaitu monopoli, ekspansi global, dan ekstraksi nilai (Jin, 2013). Namun, respons domestik seperti keberhasilan India menolak kebijakan Free Basics menunjukkan bahwa negara periferi tidak sepenuhnya tidak berdaya. Cardoso dan Faletto (1979) dalam kerangka teori dependensi memandang relasi dependensi sebagai hubungan historis-struktural yang tidak sepenuhnya menentukan hasil politik secara mekanis, karena konfigurasi kepentingan dan tindakan politik domestik turut memengaruhi bentuk hubungan tersebut. Dalam konteks kasus India, kapasitas regulator TRAI dan mobilisasi masyarakat sipil dapat dibaca sebagai bentuk agensi domestik yang memengaruhi hasil relasi dengan korporasi global. Karena itu, regulasi data yang kuat, pengembangan infrastruktur digital domestik, penguatan kerja sama regional, serta pengembangan alternatif platform berbasis komunitas dan open source dapat diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas domestik dan posisi tawar negara dalam relasi ketergantungan digital. Rekomendasi tersebut bukan berarti bahwa kebijakan tersebut secara otomatis menghapus dependensi, melainkan merupakan upaya menegosiasikan ulang syarat-syarat hubungan dengan aktor teknologi global melalui penguatan kapasitas regulasi, kontrol atas infrastruktur, dan koordinasi politik. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan mengenai kedaulatan digital tetap konsisten dengan kerangka Cardoso dan Faletto (1979), karena diarahkan pada peningkatan agensi negara dan masyarakat domestik di dalam struktur dependensi, bukan pada asumsi bahwa dependensi dapat dihapus secara instan. Diperlukan tata kelola global yang adil dalam ekonomi digital, dengan keterlibatan negara Global South dalam perencanaannya sebagai kunci mengurangi ketergantungan yang terjadi (Arun, 2025).

Negara periferi perlu bersiap menghadapi risiko hilangnya kedaulatan digital apabila terus membiarkan dominasi big tech atas infrastruktur internet. Masyarakat sipil perlu memperjuangkan net neutrality agar tidak ada pembatasan dalam pengaksesan internet, sementara pemerintah perlu membangun tata kelola global untuk mengatur regulasi internasional yang membatasi monopoli big tech. Pengalaman India menunjukkan bahwa kombinasi antara kapasitas regulasi negara yang independen, ketersediaan data dan bukti kebijakan yang memadai, serta mobilisasi masyarakat sipil digital yang terorganisasi, merupakan prasyarat penting bagi negara Global South lain—termasuk Indonesia—dalam merumuskan kebijakan net neutrality dan kedaulatan data yang mampu menyeimbangkan kepentingan inklusi digital dengan perlindungan otonomi nasional atas infrastruktur informasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan bagaimana proyek Free Basics yang diluncurkan Facebook di India merupakan contoh nyata pola dominasi global yang dibingkai sebagai inklusi digital, namun dalam praktiknya mengandung unsur neo-imperialisme digital. Dengan memanfaatkan narasi filantropi dan internet gratis, Facebook berhasil memasuki ruang digital India yang strategis dan besar pasar penggunanya, sekaligus membatasi akses internet hanya untuk aplikasi tertentu yang dikendalikan perusahaan, mengarahkan pengguna ke ekosistem digitalnya, dan menciptakan ketergantungan digital struktural, fitur yang identik dengan hubungan pusat-pinggiran dalam kerangka imperialisme tradisional. Meskipun tampak sebagai solusi atas kesenjangan digital, Free Basics justru memperlemah kedaulatan digital India: data pengguna diekstraksi ke luar negeri, inovasi lokal dan pengembang aplikasi mandiri terhambat, dan kontrol atas infrastruktur serta akses informasi berada di tangan korporasi global.

Melalui TRAI, India mengambil langkah tegas dengan melarang model zero-rating ini, menandai kemenangan regulasi dan masyarakat sipil dalam mempertahankan akses internet yang terbuka dan bebas diskriminasi. Kombinasi antara kapasitas kelembagaan regulator dan mobilisasi teknopolitik gerakan savetheinternet, sebagaimana ditunjukkan Gurumurthy dan Chami (2016) serta Prasad (2018), menjadi kunci utama keberhasilan resistensi ini. Lebih jauh, kasus India menunjukkan bahwa resistensi terhadap ekspansi big tech di Global South bukan hanya mungkin, tetapi juga penting; negara pinggiran perlu memperkuat regulasi, literasi digital masyarakat, dan infrastruktur lokal agar tidak sekadar menjadi konsumen pasif dalam ekonomi data global.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu studi kasus dan bersumber pada data sekunder. Konsekuensinya, temuan penelitian ini bersifat analitis-kontekstual: penelitian dapat menjelaskan mekanisme dominasi, resistensi, dan agensi yang terlihat dalam kasus India, tetapi tidak dapat secara otomatis digeneralisasikan ke seluruh negara Global South yang memiliki konfigurasi kelembagaan, kapasitas regulator, struktur pasar digital, dan dinamika masyarakat sipil yang berbeda. Generalisasi temuan perlu diuji lebih lanjut melalui studi komparatif dengan kasus zero-rating di negara Global South lain dan, bila memungkinkan, melalui wawancara langsung dengan aktor kebijakan serta masyarakat sipil. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji preseden India ini secara komparatif dengan kasus-kasus di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, guna menguji sejauh mana kondisi kelembagaan dan mobilisasi masyarakat sipil yang serupa dapat direplikasi dalam konteks yang berbeda. Studi ini memposisikan Free Basics bukan sebagai inisiatif kemanusiaan semata,

melainkan instrumen dominasi global, sekaligus memberi pelajaran bagi negara-negara Global South lain bahwa pembangunan digital yang sejati tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan data, akses terbuka, dan kontrol nasional atas teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2016, February 8). India blocks Zuckerberg's free net app. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/technology-35522899>
- Arun, C. (2025, March 12). 'Data colonialism' and the political economy of Big Tech. *Lawfare Media*. <https://www.lawfaremedia.org/article/data-colonialism--and-the-political-economy-of-big-tech>
- Bhatia, R. (2016, May 12). The inside story of Facebook's biggest setback. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/technology/2016/may/12/facebook-free-basics-india-zuckerberg>
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and development in Latin America*. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520342118>
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9781503609754>
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2023). The decolonial turn in data and technology research: What is at stake and where is it heading? *Information, Communication & Society*, 26(4), 786–802. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1986102>
- Desk, T. (2016, February 11). TRAI order effect: Facebook Free Basics shuts down for India. *The Indian Express*. <https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/facebook-free-basics-india-shut-down/>
- Ghoshal, D. (2016, February 9). Why TRAI backed net neutrality—and killed Facebook's Free Basics in India. *Quartz*. <https://qz.com/india/612159/why-trai-backed-net-neutrality-and-killed-facebooks-free-basics-in-india>
- Gurumurthy, A., & Chami, N. (2016). Internet governance as 'ideology in practice'—India's 'Free Basics' controversy. *Internet Policy Review*, 5(3). <https://doi.org/10.14763/2016.3.431>
- Jin, D. Y. (2013). The construction of platform imperialism in the globalization era. *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 11(1), 145–172. <https://doi.org/10.31269/triplec.v11i1.458>
- Kwet, M. (2019). Digital colonialism: US empire and the new imperialism in the Global South. *Race & Class*, 60(4), 3–26. <https://doi.org/10.1177/0306396818823172>
- Lenin, V. I. (1996). *Imperialism, the highest stage of capitalism: A popular outline*. Pluto Press. (Original work published 1917)
- Matsangou, E. (2016, February 10). India bans Facebook's Free Basics. *The New Economy*. <https://www.theneweconomy.com/technology/india-bans-facebooks-free-basics>
- Nothias, T. (2020, May 4). How to fight digital colonialism. *Boston Review*. <https://www.bostonreview.net/articles/how-to-fight-digital-colonialism>
- Prasad, R. (2018). Ascendant India, digital India: How net neutrality advocates defeated Facebook's Free Basics. *Media, Culture & Society*, 40(3), 415–431. <https://doi.org/10.1177/0163443717736117>
- Rai, S. (2016, January 4). In India, fierce opposition builds against Facebook's Free Basics. *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/saritharai/2016/01/04/in-india-fierce-opposition-builds-against-facebooks-free-basics/>

Telecom Regulatory Authority of India. (2016). *Prohibition of discriminatory tariffs for data services regulations*, 2016. Telecom Regulatory Authority of India.
https://tra.gov.in/sites/default/files/Regulation_Data_Service.pdf